

KETIDAKSINKRONAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

DEWI KUSUMA DIARTI

C100150128

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KETIDAKSINKRONAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

DEWI KUSUMA DIARTI
C100150128

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Prof. Dr. Harun, S.H, M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN
KETIDAKSINKRONAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI INDONESIA

Oleh:

DEWI KUSUMA DIARTI
C100150128

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 09 Januari 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Iswanto, S.H., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Jaka Susila, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

(R)
(Iswanto)
(Jaka)



Dekan,

Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 Januari 2019

Penulis



Dewi Kusuma Diarti
C100150128

KETIDAKSINKRONAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yang bersifat deskriptif dimana data yang diperoleh berasal dari studi kepustakaan. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah karena seringkali Pemerintah mengeluarkan lebih dari 1 (satu) jenis peraturan hukum yang mengatur tentang hal yang sama atau berkaitan. Hasil penelitian ini terdapat ketidak sinkronan Peraturan perundang-undangan di Indonesia misalnya antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah.

Kata Kunci: sinkronisasi, regulasi

Abstract

This research was conducted to determine the synchronization of laws and regulations in Indonesia. The research method used in this study is juridical-normative descriptive nature in which the data obtained comes from library studies. The background of the conduct of this research is because often the Government issues more than 1 (one) type of legal regulation governing the same or related matters. The results of this study are that there is no synchronization of laws and regulations in Indonesia, for example between Law Number 25 of 2007 concerning Investment, Presidential Regulation Number 97 of 2014 concerning One-Stop Integrated Services and Minister of Home Affairs Regulation No. 138 of 2017 concerning One-Stop Integrated Services in the area.

Keywords: synchronization, regulation

1. PENDAHULUAN

Sistem Hukum merupakan suatu susunan yang hierarkis dalam tata norma dan tidak boleh bertentangan antara norma-norma hukum yang berlaku baik secara vertikal ataupun secara horizontal. Di Indonesia peraturan perundang-undangan memiliki hierarki yang termuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Teori hukum tentang hierarki perundangan ini juga dikemukakan oleh Hans Kelsen, seorang keturunan Yahudi kelahiran 18 oktober 1881 yang dikenal dengan *Stufenbau Theory*. Kelsen berpendapat bahwa norma dasar menjadi alasan keabsahan dari norma hukum yang berasal dari tatanan hukum yang sama, maka norma dasar

tersebut merupakan kesatuan dari beraneka macam norma ini. Kesatuan ini juga terungkap oleh fakta bahwa tatanan hukum dapat dijelaskan dalam aturan hukum yang tidak bertentangan satu sama lain. Hans Kelsen menjelaskan jika terjadi pertentangan antara norma yang satu dengan norma yang lainnya, maka norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi menjadi dasar keabsahan norma yang lebih rendah.¹

Di Indonesia tak jarang dikeluarkan lebih dari satu regulasi yang mengatur hal yang sama, misalnya berkaitan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal kemudian Menteri dalam Negeri membuat Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal. Kemudian muncul Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan mencabut Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif atau penelitian hukum dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.² Namun berfokus pada norma hukum positif seperti norma perundang-undangan. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian hukum doktrinal pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang

¹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2011, hal 223

² Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 102.

atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³

2.2 Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum doktrinal sesungguhnya merupakan esensi dari metode penelitian itu sendiri. Pendekatan itu yang memungkinkan diperoleh jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yang diajukan. Pendekatan yang dapat dipakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketidaksinkronan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional⁴. Prinsip negara hukum yang dianut di Indonesia adalah Negara modern, yaitu negara hukum pancasila, maka fungsi peraturan perundang-undangan bukanlah hanya memberi bentuk kepada endapan nilai-nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat namun peraturan perundang-undangan diharapkan mampu untuk memimpin dan membimbing perkembangan dan perubahan masyarakat.

Dalam Ilmu Hukum dibedakan antara undang-undang dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formil.⁵ Undang-undang dalam arti materiil merupakan setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya berkaitan dengan aturan tingkah laku yang sifatnya mengikat secara umum⁶. Sedangkan dalam arti formil adalah keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang mengikat secara umum⁷.

³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hal: 118

⁴ Penjelasan Umum UU NO.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁵ Mukhlis Taib, *Dinamika Peraturan perundang-undangan*, 2017, PT Refika Aditama, Bandung, hal.1

⁶ *Ibid.* hal.2

⁷ *Ibid.* hal.3

Di Indonesia terdapat beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Pasal 7 UU Nomor 12 tahun 2011 yaitu : (a) *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*; (b) *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat*; (c) *Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*; (d) *Peraturan Pemerintah*; (e) *Peraturan Presiden*; (f) *Peraturan Daerah Provinsi*; dan (h) *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*.

Selain yang termuat dalam Pasal 7 terdapat pula peraturan yang termuat dalam Pasal 8 yang memiliki kekuatan hukum yaitu *peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat dan dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat*.

Banyaknya jenis peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan konsekuensi banyaknya peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk membantu undang-undang. Tak jarang peraturan-peraturan tersebut malah saling bertentangan antara satu sama lain, sehingga mengakibatkan salah satu peraturan tidak dapat dilaksanakan, dan hal tersebut bertentangan dengan asas peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk ketidak sinkronan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dilihat pada regulasi yang mengatur tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terdapat regulasi yang berkaitan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Penanaman Modal, Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 dengan Perpres Nomor 97 Tahun 2014.

Dari peraturan yang ada tersebut terjadi ketidak sinkronan antara Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 dengan Perpres Nomor 97 Tahun 2014 berkaitan dengan bentuk lembaga penyelenggara PTSP. Apabila menurut Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 lembaga penyelenggara PTSP berbentuk Dinas sedangkan menurut Perpres Nomor 97 Tahun 2014 berbentuk Badan.

Padahal menurut PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah antara kedua Jenis Perangkat Daerah tersebut memiliki perbedaan yaitu jika Dinas Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan Unsur Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan Badan merupakan Unsur Penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berkaitan dengan kewenangan perizinan dan non perizinan yang dimiliki oleh lembaga atau instansi yang menyelenggarakan PTSP di daerah baik BPMPTSP ataupun DPMPTSP terdapat perbedaan antara keduanya.

4. PENUTUP

Terjadi ketidak sinkronan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia yang dapat dibuktikan dengan adanya ketidak sinkronan antara Presiden Nomor 97 Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 menunjukkan ketidak Sinkronan mengenai pengaturan tentang bentuk lembaga yang memiliki Kewenangan untuk melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman Modal. Menurut Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 lembaga penyelenggara PTSP berbentuk Dinas sedangkan menurut Perpres Nomor 97 Tahun 2014 berbentuk Badan.

Perlu Adanya sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan karena suatu peraturan yang berada dibawahnya harus sesuai dengan peraturan yang ada diatasnya seperti yang disebutkan oleh Hans Kelsen dalam *Stufenbeau Theory*. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan perlu dilakukan agar suatu peraturan yang dibentuk dapat memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006, hal: 118

Kelsen,Hans. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2011.

Taib,Mukhlis. *Dinamika Peraturan perundang-undangan*, 2017, PT Refika Aditama, Bandung.

Undang-Undang NO.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.